

Determinan Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara: Peran Zakat sebagai Variabel Pemoderasi

Faisal Umri Nasution¹, Suratno², Sailendra³, Darmansyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pancasila, Jakarta

umrifaisa19@gmail.com

Abstract

Poverty remains a significant issue in North Sumatra, with the percentage of poor people in urban areas reaching 4.93% in 2022 and 4.67% in the first semester of 2023. This phenomenon is influenced by various factors, including inflation, unemployment rate, per capita income, and Human Development Index (HDI). This study aims to examine the effects of these factors on poverty levels, measured by the Poverty Severity Index (PSI), and to evaluate the role of zakat as a moderating variable in the relationship between economic factors and poverty. The study findings reveal that inflation and per capita income have a significant negative impact on PSI, meaning that increases in inflation and per capita income are associated with a reduction in poverty severity. Conversely, HDI shows a significant positive impact on PSI, indicating that higher HDI in some regions can actually increase poverty severity. The unemployment rate does not show a significant effect on PSI. The role of zakat as a moderating variable was also found to be significant. Zakat weakens the negative effect of inflation on poverty and strengthens the negative effect of per capita income on poverty. However, zakat does not moderate the relationship between HDI and unemployment rate with poverty. This study provides insights into how zakat can function as a tool to enhance the effectiveness of economic factors in reducing poverty in North Sumatra.

Keywords: Poverty, Zakat, Inflation, Income per Capita, Human Development Index

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi masalah signifikan di Sumatera Utara, dengan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 4,93% pada tahun 2022 dan 4,67% pada semester pertama tahun 2023. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kemiskinan yang diukur melalui Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK), serta mengevaluasi peran zakat sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara faktor-faktor ekonomi dan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan pendapatan per kapita memiliki dampak negatif signifikan terhadap IKK, yang berarti peningkatan inflasi dan pendapatan per kapita berhubungan dengan penurunan keparahan kemiskinan. Sebaliknya, IPM menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IKK, mengindikasikan bahwa peningkatan IPM di beberapa daerah justru dapat meningkatkan keparahan kemiskinan. Tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IKK. Peran zakat sebagai variabel moderasi juga ditemukan signifikan. Zakat memperlemah pengaruh negatif inflasi terhadap kemiskinan dan memperkuat pengaruh negatif pendapatan per kapita terhadap kemiskinan. Namun, zakat tidak memoderasi hubungan antara IPM dan tingkat pengangguran dengan kemiskinan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas faktor-faktor ekonomi dalam mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara.

Kata kunci: Kemiskinan, Zakat, Inflasi, Pendapatan per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Setelah krisis moneter, Pemerintah Indonesia memulai pemulihan ekonomi nasional. Perbaikan ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan, didorong oleh pembangunan yang lebih baik akibat stabilitas politik yang kondusif [1]. Menurut data Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk dan Sensus Ekonomi, angka kemiskinan di desa dan kota di seluruh Indonesia menurun dari puncaknya pada krisis ekonomi 1998 hingga 2017. Di desa, jumlah penduduk miskin mencapai puncak 47,97 juta jiwa pada tahun 1999, menurun hampir setengahnya menjadi 26,58 juta jiwa pada 2017. Di perkotaan, angka kemiskinan menurun 41,65 persen menjadi 20,27 juta jiwa. Penurunan ini disebabkan oleh kembalinya aktivitas industri, peningkatan sektor usaha, dan kelancaran transportasi

serta logistik, yang mendorong peningkatan lapangan kerja [2].

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan yang kuat. Pada triwulan IV 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,01% (yoy), meskipun ekonomi global mengalami perlambatan. Sepanjang tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31% (yoy), naik signifikan dari 3,70% (yoy) pada tahun sebelumnya. Proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2023 diperkirakan tetap kuat di kisaran 4,5% hingga 5,3%, didukung oleh peningkatan permintaan domestik, pulihnya mobilitas masyarakat setelah penghapusan PPKM, perbaikan prospek bisnis, peningkatan investasi asing, dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi ini tercermin dalam hampir semua komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,48% (yoy), sejalan dengan peningkatan mobilitas dan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Ekspor juga tumbuh tinggi, mencapai 14,93% (yoy), didorong oleh permintaan kuat dari mitra dagang utama. Meskipun investasi secara keseluruhan tumbuh 3,33% (yoy), investasi non-bangunan menunjukkan performa baik, sejalan dengan kinerja ekspor. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,77% (yoy) karena penurunan belanja untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi.

Meskipun perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang mengembirakan, masih ada tantangan yang perlu segera diatasi [3]. Pertumbuhan ekonomi yang pesat belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, di mana kesenjangan kesejahteraan antara perkotaan dan pedesaan semakin nyata [4]. Hal ini berdampak negatif pada pembangunan ekonomi dan keharmonisan sosial, sehingga tujuan kemakmuran bersama belum tercapai [5]. Oleh karena itu, meningkatkan pendapatan di daerah miskin dan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin menjadi langkah yang tak terelakkan dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama [6].

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2023 menunjukkan bahwa terdapat 25,9 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia yang memenuhi 9 dari 14 kriteria kemiskinan. Mereka hanya mampu membeli satu set baju baru, makan sekali sehari, tidak mampu membayar biaya pengobatan, berpenghasilan kurang dari Rp 500.000 per bulan, dan tidak memiliki pendidikan tinggi. Kondisi mereka juga termasuk tidak menggunakan listrik, jarang mengonsumsi daging atau susu, dan tinggal di rumah dengan luas kurang dari 8 meter persegi.

Kemiskinan terjadi ketika kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal layak, pendidikan, dan kesehatan tidak dapat terpenuhi. Data dari September 2022 hingga Maret 2023 menunjukkan bahwa Pulau Sumatera adalah pulau kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Jawa, dengan kontribusi 5,67 juta jiwa atau 21,89% dari total kemiskinan di Indonesia. Provinsi Bengkulu memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Sumatera, sedangkan Sumatera Utara berada di urutan keempat. Di Sumatera Utara, kemiskinan di perkotaan rata-rata 4,93% pada 2022 dan 4,67% pada semester pertama 2023, sedangkan di pedesaan meningkat dari 7,97% pada 2022 menjadi 8,03% pada semester pertama 2023.

Meskipun angka kemiskinan di Sumatera Utara menurun dari 1,3 juta jiwa pada 2020 menjadi 1,24 juta jiwa pada 2023, distribusi kemiskinan di kabupaten/kota tidak merata. Kota Medan mencatat jumlah penduduk miskin tertinggi, sementara Pakpak Barat memiliki angka kemiskinan terendah. Kabupaten

Nias Barat memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, sedangkan Deli Serdang memiliki indeks terendah. Fluktuasi angka kemiskinan di Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan hingga 2019, meningkat kembali pada 2020-2021, dan menurun pada 2022. Peningkatan kemiskinan selama 2020-2021 mungkin terkait dengan dampak kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

Beberapa faktor utama yang diduga memperburuk kemiskinan di Sumatera Utara termasuk inflasi yang dipicu oleh kebijakan PSBB dan PPKM. Pembatasan mobilitas masyarakat mengakibatkan penurunan pendapatan dan permintaan barang dan jasa, sementara biaya produksi meningkat. Akibatnya, harga kebutuhan pokok naik, memicu inflasi. Inflasi, yang merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara berkelanjutan, menurunkan daya beli masyarakat karena nilai uang menurun seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi yang terus meningkat dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik secara berkelanjutan, melemahkan daya beli masyarakat karena biaya produksi yang meningkat [7]. Hal ini mengakibatkan peningkatan kemiskinan karena biaya hidup yang tinggi mendorong sebagian masyarakat kelas menengah turun ke kelas menengah bawah, terutama ketika pendapatan tidak meningkat namun kebutuhan dasar semakin besar [8]. Kenaikan inflasi, diperburuk oleh pandemi COVID-19, memaksa beberapa kelompok berpenghasilan menengah menjadi miskin. Penelitian menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi sering berkontribusi pada peningkatan kemiskinan, karena masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang dan jasa sementara pendapatan mereka stagnan, yang berdampak pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa inflasi tidak selalu berdampak pada peningkatan kemiskinan [9].

Selain inflasi, tingkat pengangguran yang tinggi juga diduga berperan signifikan dalam meningkatkan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Pengangguran terjadi ketika individu tidak memiliki pekerjaan, terpaksa berhenti bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari seminggu, atau bekerja dengan upah di bawah standar minimum. Kelompok ini termasuk dalam angkatan kerja tetapi belum memiliki pekerjaan atau pekerjaan yang layak, atau telah mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kebangkrutan perusahaan [10].

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi pada peningkatan kemiskinan. Semakin tinggi pengangguran, semakin rendah pendapatan masyarakat, yang mengurangi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup dan mengakibatkan mereka masuk dalam kategori miskin, sehingga angka kemiskinan meningkat. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa persentase pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan [11]. Ada juga penelitian yang menemukan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Selain faktor-faktor yang telah dibahas, pendapatan per kapita juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Peningkatan pendapatan per kapita biasanya berdampak positif pada pengurangan kemiskinan. Ketika pendapatan rata-rata meningkat, lebih banyak orang dapat mengakses kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pendapatan per kapita yang lebih tinggi sering kali mengindikasikan ketidaksetaraan pendapatan yang lebih rendah, yang membantu mengurangi kemiskinan karena lebih banyak orang memiliki akses ke peluang ekonomi. Selain itu, pendapatan per kapita yang tinggi dapat mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru dan peluang ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh terhadap kemiskinan, namun ada juga studi yang menemukan bahwa pendapatan per kapita tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan [12].

Faktor terakhir yang memengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM, atau Human Development Index (HDI), merupakan ukuran yang menggabungkan harapan hidup, tingkat literasi, pendidikan, dan standar hidup untuk menilai tingkat pembangunan manusia di berbagai negara [13]. IPM juga digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup penduduk. Rendahnya IPM sering kali mencerminkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan pendapatan, yang dapat meningkatkan tingkat kemiskinan karena pendapatan yang minim. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa IPM tidak selalu berdampak signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan di suatu daerah [14].

Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, peran zakat sebagai benteng pertahanan ekonomi masyarakat sangat penting [15]. Zakat, yang merupakan salah satu dari lima pilar utama Islam, tidak hanya sebagai kewajiban religius tetapi juga memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang signifikan. Dalam Al-Quran, zakat disebutkan sebagai kewajiban penting yang mengokohkan ketaatan, membersihkan harta, dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Ayat-ayat seperti QS Al-Baqarah 43, QS Al-Tawbah 103, dan QS Al-Baqarah 267 menggarisbawahi peran zakat dalam membersihkan harta, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan meningkatkan keimanan serta investasi akhirat.

Di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan. Distribusi zakat kepada delapan kelompok penerima (mustahik), termasuk penduduk miskin, dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan [16]. Penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat memoderasi dampak IPM terhadap kemiskinan, meningkatkan IPM, dan mengurangi

angka kemiskinan. Selain itu, zakat berperan dalam menurunkan pengangguran dengan memberikan modal kerja dan melindungi daya beli masyarakat miskin dari dampak inflasi, sehingga mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan fenomena kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta identifikasi celah penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor utama penyebab kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dan menilai peran zakat sebagai variabel pemoderasi dalam konteks tersebut. Kontribusi utamanya meliputi identifikasi dan analisis faktor-faktor kemiskinan seperti inflasi, pengangguran, pendapatan per kapita, dan IPM, serta menguji peran zakat dalam mengurangi dampak negatif dari faktor-faktor tersebut terhadap kemiskinan [17]. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk optimalisasi pengelolaan zakat dan strategi penanggulangan kemiskinan, serta menyumbang pada pengembangan teori terkait peran zakat dalam manajemen kemiskinan [18].

Teori Siklus Kemiskinan, menjelaskan bagaimana kemiskinan dapat membentuk siklus yang sulit diputus, terutama jika faktor-faktor penyebabnya tidak diatasi. Konsep ini menggambarkan kemiskinan sebagai lingkaran tanpa awal atau akhir, di mana rendahnya pendapatan menyebabkan kurangnya tabungan dan investasi, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas dan pendapatan [19]. Hal ini menyebabkan kemiskinan berlanjut secara berkelanjutan. Beberapa pemicu siklus ini meliputi keterbatasan akses pendidikan, kondisi kesehatan yang buruk, kurangnya modal finansial, pekerjaan berbayar rendah, rendahnya mobilitas sosial, perumahan tidak layak, ketergantungan pada kegiatan kriminal, kurangnya dukungan sosial, perasaan putus asa, dan ketidaksetaraan struktural [20].

Inflasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menjaga inflasi pada tingkat rendah, bahkan mendekati nol, dapat mengendalikan kenaikan harga barang, sehingga mengurangi beban konsumsi rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan inflasi rendah, masyarakat dapat menyisihkan penghasilan untuk tabungan dan investasi produktif [21]. Sebaliknya, inflasi tinggi dapat menggerus nilai penghasilan riil dan daya beli uang, membuat orang dengan penghasilan tetap atau yang tidak meningkat sesuai inflasi merasa semakin miskin. Inflasi yang tinggi juga berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa dasar, memperburuk biaya hidup bagi kelompok berpenghasilan rendah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inflasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi dapat meningkatkan kemiskinan dengan memperburuk beban ekonomi rumah tangga. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut H1:

Inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Pengangguran dan kemiskinan saling terkait erat, di mana tingginya tingkat pengangguran dapat memperburuk kemiskinan, dan sebaliknya, kemiskinan tinggi dapat meningkatkan pengangguran. Pengangguran menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan sering mempengaruhi kelompok rentan seperti kaum muda dan minoritas. Kehilangan pekerjaan mengubah prioritas pengeluaran dari tabungan menjadi kebutuhan dasar seperti makanan dan perumahan, meningkatkan tekanan finansial dan risiko kemiskinan. Tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi pada peningkatan kemiskinan. Berdasarkan hal ini, hipotesis kedua adalah H2: Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Pendapatan per kapita merujuk pada rata-rata pendapatan yang diterima setiap individu dalam suatu negara atau wilayah dan sering digunakan sebagai indikator kemiskinan. Pendapatan per kapita yang rendah sering kali menandakan tingkat kemiskinan yang tinggi, karena individu dengan pendapatan rendah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pangan, perumahan, dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pendapatan per kapita yang rendah dapat memperburuk siklus kemiskinan dengan mengurangi akses ke pendidikan berkualitas dan keterampilan, yang berdampak pada generasi berikutnya. Orang dengan pendapatan rendah sering kali menghadapi masalah kesehatan dan gizi, yang dapat mengurangi produktivitas dan kualitas hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita dapat mengurangi kemiskinan dengan memperbaiki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis ketiga adalah H3: Pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kemajuan suatu wilayah dengan mempertimbangkan layanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM mencakup pendapatan per kapita, kesehatan (harapan hidup), dan pendidikan (tingkat melek huruf). Pendapatan per kapita dalam IPM menunjukkan akses penduduk terhadap pendapatan yang cukup untuk kebutuhan dasar, menjadikannya lebih komprehensif dibandingkan hanya mengandalkan pendapatan saja. IPM yang rendah sering mencerminkan tingkat kemiskinan yang tinggi karena keterbatasan dalam akses ke layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa IPM yang rendah berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan bahwa perbaikan IPM dapat mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, hipotesis keempat adalah H4: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan dapat dijelaskan dengan cara-cara berikut: Inflasi, yaitu kenaikan harga

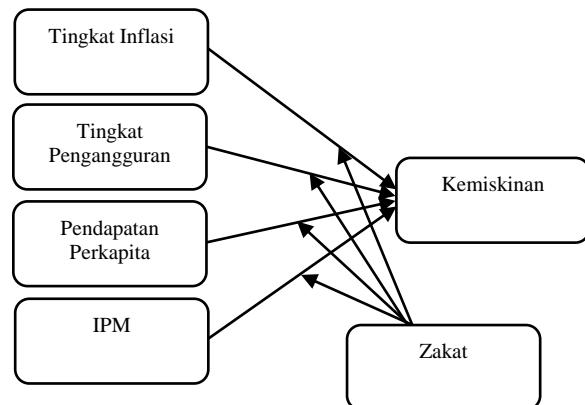
barang dan jasa secara umum, dapat menurunkan daya beli uang, memengaruhi aktivitas ekonomi, dan menurunkan permintaan agregat. Inflasi tinggi dapat mengakibatkan ketidakpastian ekonomi, mengurangi kemampuan konsumen, dan meningkatkan tingkat pengangguran karena perusahaan mungkin mengurangi produksi atau menunda perekutan. Zakat, kewajiban sumbangan keagamaan dalam Islam, dapat berfungsi sebagai alat distribusi pendapatan yang efektif. Dengan penyaluran zakat yang tepat, dana ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, dan pendidikan, serta memberikan peluang kerja kepada penerima zakat. Zakat yang dikelola dengan baik dapat mengurangi kemiskinan dan mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok masyarakat yang rentan, terutama dalam konteks inflasi, dengan memoderasi dampak inflasi terhadap pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, hipotesis kelima adalah H5: Zakat mampu memoderasi hubungan antara inflasi dan kemiskinan di Sumatera Utara.

Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang mampu bekerja tidak memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan tetap. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan karena individu tanpa pekerjaan tidak memiliki pendapatan reguler untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Zakat, sebagai kewajiban dalam Islam, mendorong umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Dana zakat dapat digunakan untuk membantu individu atau keluarga yang menganggur dengan memberikan bantuan keuangan atau barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian. Selain itu, zakat dapat membiayai program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan peluang kerja atau digunakan sebagai modal awal untuk memulai usaha kecil, yang dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang. Dengan bantuan zakat, individu pengangguran dapat menjadi mandiri secara ekonomi, mengurangi risiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Oleh karena itu, hipotesis keenam adalah H6: Zakat mampu memoderasi hubungan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan di Sumatera Utara.

Pendapatan per kapita yang rendah sering kali berhubungan langsung dengan kemiskinan, karena membatasi akses individu terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan, mengumpulkan dana dari individu dengan pendapatan lebih tinggi dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Dengan cara ini, zakat mengurangi ketimpangan pendapatan dan membantu orang-orang dengan pendapatan per kapita rendah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, zakat dapat mendukung program pemberdayaan ekonomi dengan memberikan modal usaha atau membangun infrastruktur yang memperkuat komunitas miskin, sehingga memperbaiki akses ke fasilitas dasar seperti air bersih dan pelatihan keterampilan. Dengan cara ini, zakat dapat memoderasi dampak pendapatan per kapita

yang rendah terhadap kemiskinan dengan memperkuat daya beli dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketujuh adalah H7: Zakat mampu memoderasi hubungan antara pendapatan per kapita dan kemiskinan di Sumatera Utara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tingkat pembangunan suatu negara dengan menggabungkan tiga komponen utama: harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Negara dengan IPM tinggi umumnya menunjukkan akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Zakat, sebagai pilar penting dalam Islam, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung dan mendukung proyek pembangunan sosial, sekolah dan rumah sakit. Selain itu, zakat dapat memberdayakan masyarakat miskin dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan modal usaha, serta mengatasi kemiskinan struktural yang disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan cara ini, zakat tidak hanya membantu individu atau keluarga dalam kondisi kemiskinan tetapi juga berkontribusi pada peningkatan IPM secara keseluruhan dengan mengatasi faktor-faktor yang menghambat pembangunan manusia. H8: Zakat mampu memoderasi hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan kemiskinan di Sumatera Utara. Selanjutnya desain penelitian ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Desain Penelitian

2. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 Kabupaten/Kota. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan aspek atau ketentuan tertentu [22]. Kriteria untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara; Periode pengamatan selama 4 tahun, dari tahun 2019 sampai 2022. Selanjutnya sampel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sampel Penelitian

Prosedur Penentuan Sampel	Jumlah
Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Utara	33
Periode pengamatan (tahun)	4
Jumlah Sampel Penelitian	132

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan metode *Non Participant Observational*, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti hanya mengamati data yang telah tersedia tanpa ikut menjadi bagian dari suatu sistem data yaitu dengan mencatat data yang tercantum pada website dari objek yang diteliti yaitu website resmi instansi pemerintah, sehingga dapat diperoleh data yang akurat, gambaran umum kemiskinan serta perkembangannya yang kemudian digunakan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Situs Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), Situs Bank Indonesia (www.bi.go.id), dan website resmi pemerintah daerah. Berdasarkan desain penelitian pada Gambar 1, peneliti mengelompokkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian menjadi variabel independen (X), variabel dependen (Y) dan variabel moderasi (Mo).

Adapun penjelasannya masing-masing variabel adalah sebagai berikut variabel Independen dalam penelitian ini adalah Inflasi (INF), Tingkat Pengangguran (TKP), Pendapatan Perkapita (PKP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel Dependend dalam penelitian ini adalah Kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Utara (Y). Variabel moderasi dalam hal penelitian ini adalah Zakat. Definisi operasional variabel dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Uraian Variabel	Instrumen Dimensi	Skala
Kemiskinan (K)	$\text{Indeks Keparahan Kemiskinan} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ Dimana : $\alpha = 2$; $z = \text{garis kemiskinan}$; $y_i = \text{Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q)}$; $y_i < z$; $q = \text{Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan}$; $n = \text{jumlah penduduk}$.	Rasio
Inflasi (INF)	Tingkat Inflasi = indikator ekonomi makro yang mengukur kekuatan daya beli masyarakat terhadap barang/jasa.	Rasio
Pengangguran	$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah penduduk belum mendapatkan pekerjaan}}{\text{Jumlah Penduduk produktif secara keseluruhan}}$	Rasio
Pendapatan Perkapita	Pendapatan perkapita dihitung dengan membagi total pendapatan suatu wilayah atau negara dengan jumlah penduduknya. Angka ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap orang dalam populasi tersebut.	Rasio
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia diukur menggunakan Indeks Kesehatan yang merupakan persentase dari angka harapan hidup, Indeks pendidikan yang dberasal dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Terakhir diperoleh dari Indeks Pengeluaran yang diperoleh dari PNB per kapita.	Rasio
Zakat	Pencapaian Penyerapan Zakat = $\frac{\text{Jumlah penyaluran zakar ke mustahik}}{\text{jumlah penerimaan zakat yang terkumpul}}$	Rasio

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode statistik dengan bantuan program Eviews 10. Adapun tahapan atau langkah-langkahnya adalah dengan melakukan analisis kuantitatif terdiri dari estimasi model regresi dengan menggunakan data panel; pemilihan model regresi data panel; uji asumsi klasik; uji hipotesis. Selain itu, uji interaksi (MRA), kemudian uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. Pengujian regresi dengan MRA dilakukan untuk

menjawab hipotesis penelitian terkait variabel moderasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten Kota yang tersebar di Sumatera Utara selama periode 2019 sampai 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Indek Keparahan Kemiskinan (IKK), Tingkat Inflasi (Inf), Tingkat Pengangguran (TKP), Pendapatan Per Kapita (PPK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, selain itu data yang berhubungan dengan perolehan jumlah Zakat Maal dan Zakat Fitrah diperoleh dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Data kemudian dikelompokkan berdasarkan panel tahunan yang diurutkan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sesuai dengan masing-masing objek penelitian. Tabel 3 menjelaskan secara rinci terkait analisis deskriptif masing masing variabel dengan rincian.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	IKK (indek)	INFLASI (%)	TKP (%)	PPK (Juta Rp)	IPM (indek)	ZAKAT (Juta Rp)
Mean	0.334167	3.262045	4.878182	46.941.570	71.04583	6.21E+08
Median	0.270000	2.430000	4.755000	42.477.010	70.96500	0.000000
Maximum	1.310000	6.420000	11.50000	1.12e+08	81.76000	7.78E+09
Minimum	0.020000	0.540000	0.190000	19.975.206	61.14000	0.000000
Std. Dev.	0.212779	1.867828	2.790098	20.859.918	4.525995	1.19E+09
Skewness	1.905028	0.725313	0.201641	1.170664	-0.218820	2.846559
Kurtosis	7.801005	1.917830	2.278275	4.000898	3.092116	13.50253
Jarque-Bera Probability	206.6140 0.000000	18.01476 0.000123	3.759379 0.152637	35.65989 0.000000	1.100076 0.576928	784.9315 0.000000
Sum	44.11000	430.5900	643.9200	6.20E+09	9378.050	8.20E+10
Sum Sq.	5.931008	457.0301	1019.789	5.70E+16	2683.486	1.87E+20
Dev.						
Observations	132	132	132	132	132	132

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 3 untuk periode 2019 hingga 2022, terdapat beberapa temuan penting. Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) memiliki rata-rata 0,33 dengan variasi yang moderat di antara perusahaan yang diteliti. Tingkat inflasi di Sumatera Utara rata-rata sebesar 3,26%, menunjukkan fluktuasi yang cukup besar antarwilayah. Tingkat Pengangguran (TKP) rata-rata 4,87%, dengan variasi yang signifikan di berbagai Kabupaten/Kota. Pendapatan per kapita rata-rata Rp 46,94 juta, mencerminkan perbedaan yang besar antarwilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata 71,04, menunjukkan variasi dalam tingkat pembangunan manusia. Sementara itu, zakat sebagai variabel moderasi memiliki rata-rata Rp 621 juta, dengan perbedaan yang besar di seluruh wilayah Sumatera Utara. Persamaan Regresi Utama adalah $IKK = \alpha + \beta_1 Inf + \beta_2 TKP + \beta_3 PPK + \beta_4 IPM + \beta_5 Zakat + \epsilon$

Dimana: α = Intercept atau titik potong garis regresi; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Sensitivitas variabel bebas dan moderasi (Inf, TKP, PPK, IPM dan Zakat) terhadap variabel terikat (IKK). *Chow test* (Uji Chow) yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau

Common Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hasil Uji Chow ditampilkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Output Estimasi Membandingkan Model CEM vs Model FEM

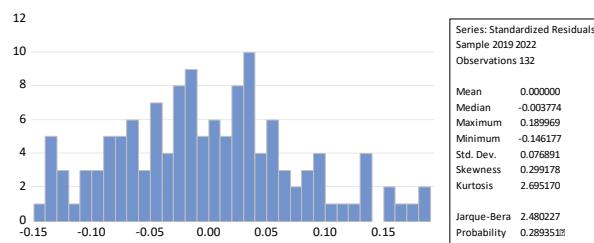
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.779630	(32,94)	0.0000
Cross-section Chi-square	170.845551	32	0.0000

Berdasarkan Chow test (Uji Chow) dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena hasil *Prob Cross-section Chi-Square* lebih kecil dari alpha ($0,0000 < 0,05$), sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Setelah melakukan Uji Chow dan didapatkan model yang tepat adalah *Fixed Effect*, maka selanjutnya kita akan menguji model manakah antara *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai Uji Hausman. Selanjutnya Output Estimasi Membandingkan Model FEM vs Model REM disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Output Estimasi Membandingkan Model FEM vs Model REM

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.911284	5	0.0107

Berdasarkan Uji Hausman dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena hasil *Prob Cross-section random* lebih kecil dari alpha ($0,0107 < \alpha 0,05$), sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Sehingga dapat diambil kesimpulan *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan dari pada *Random Effect Model*. Uji Normalitas merupakan pengujian yang mengetahui apakah data residual terdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *Jaque Bera* sebesar 6,034 yang lebih kecil dari 10 dan nilai *Probability* lebih kecil dari Alpha 0,05 yaitu 0,04, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data residual tidak terdistribusi normal, oleh sebab itu data penelitian perlu dilakukan transformasi data. Selanjutnya Hasil Uji Normalitas ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian yang digambarkan pada Gambar 2 diperoleh nilai *Jaque Bera* sebesar 2,48 yang lebih kecil dari 10 dan nilai *Probability* lebih besar dari Alpha 0,05 yaitu 0,28, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data residual terdistribusi normal, sehingga bisa digunakan untuk pengujian tahap berikutnya. Pengujian multikolinieritas merupakan sebuah metode yang menguji apakah adanya hubungan keterkaitan yang kuat antar variabel penjelas atau variabel bebas. Selanjutnya Hasil Uji Multikolinieritas menggunakan

Korelasi Antar Variabel Penyebab disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas menggunakan Korelasi Antar Variabel Penyebab

	INFLASI	IPM	PPK	ZAKAT	TKP
INFLASI	1	0.027030	-0.03440	0.067472	-0.06534
IPM	0.0270	1	-0.024758	0.268610	0.48674
PPK	-0.0344	-0.02475	1	0.102566	0.03271
ZAKAT	0.06747	0.268610	0.102566	1	0.55560
TKP	-0.06534	0.486744	0.032710	0.555606	1

Dari hasil pengujian diperoleh koefisien korelasi antar masing-masing variabel penjelas atau variabel bebas (IKK, TKP, IPM, Inflasi, PPK dan Zakat), semuanya memiliki nilai di bawah 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini sudah terbebas dari gejala multikolinieritas (H_0 diterima dan H_1 ditolak). Pengujian Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya kesenjangan dan pengaruh data berdasarkan periode waktu sebelumnya yang akan mempengaruhi hasil prediksi periode berikutnya. Selanjutnya Hasil Uji Autokorelasi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.830098	Mean dependent var	0.334167
Adjusted R-squared	0.765714	S.D. dependent var	0.212779
S.E. of regression	0.102992	Akaike info criterion	-1.476659
Sum squared resid	1.007689	Schwarz criterion	-0.668601
Log likelihood	134.4595	Hannan-Quinn criter.	-1.148301
F-statistic	12.89295	Durbin-Watson stat	1.624389
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai *Durbin-watson* adalah 1,624. Dari tabel durbin Watson dapat diketahui nilai DU 1,619. Maka perbandingan yang cocok adalah DU<DW<4-DU atau 1,619<1,624<2,381 artinya tidak terdapat masalah auto korelasi positif atau negatif. Oleh sebab itu, seluruh data dalam variabel bisa digunakan untuk analisis regresi dan menjawab hipotesis penelitian dengan baik. Pengujian hipotesis dimulai dari pengujian persamaan regresi tanpa variabel moderasi dengan memasukkan variabel Inflasi (INF), Tingkat Pengangguran (TKP), Pendapatan Perkapita (PPK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai prekursor atau faktor pemicu tingkat Kemiskinan yang diprosksikan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Hasil pengujian hipotesis pada persamaan utama ditampilkan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Regresi Data Panel Tanpa Variabel Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.805200	1.942924	-2.473180	0.0151
INFLASI	-0.020765	0.007217	-2.877327	0.0049
TKP	0.010264	0.011502	0.892359	0.3744
PPK	-0.035876	0.089556	-2.577865	0.0158
IPM	0.072587	0.027523	2.637335	0.0097

Selain itu, dalam persamaan regresi dimasukkan interaksi variabel moderasi Zakat (Z) terhadap kekuatan hubungan variabel independen atau penyebab seperti Inflasi (INF), Tingkat Pengangguran (TKP), Pendapatan Perkapita (PPK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap variabel dependen

Kemiskinan. Hasil pengujian hipotesis pada persamaan utama disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Pengujian Model Regresi dengan Interaksi Variabel Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.805984	1.979548	-2.427819	0.0171
INFLASI_ZAKAT	-0.000105	5.31E-05	-1.979154	0.0488
TKP_ZAKAT	3.49E-05	0.000109	0.319338	0.7502
PPK_ZAKAT	0.000301	0.023446	1.986877	0.0427
IPM_ZAKAT	2.92E-06	8.32E-06	0.351115	0.7263

Berdasarkan Tabel 9, koefisien untuk inflasi adalah -0,020 dengan nilai probabilitas 0,0049<0,05. Ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap IKK. Dengan kata lain, peningkatan inflasi cenderung menurunkan keparahan kemiskinan. Penurunan ini bisa terjadi karena peningkatan inflasi memengaruhi harga barang dan jasa, yang bisa berdampak pada pengeluaran rumah tangga. Penelitian ini memberikan bukti yang berlawanan dengan hipotesis, bahwa inflasi ternyata tidak selalu berhubungan positif dengan naiknya tingkat Kemiskinan pada suatu daerah atau wilayah. Hal ini disebabkan inflasi tidak selalu merata di semua sektor ekonomi dan daerah. Beberapa daerah mungkin mengalami inflasi yang lebih tinggi daripada daerah lain. Jika daerah tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dampaknya akan lebih terasa pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan harga kebutuhan pokok. Selain itu, inflasi yang turun tetapi tingkat kemiskinan meningkat, karena penurunan inflasi terjadi saat harga kebutuhan pokok dan harga barang sudah naik dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan kenaikan harga tidak mampu diimbangi dengan kenaikan penghasilan pekerja atau sektor swasta. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_1 tidak terdukung.

Berdasarkan Tabel 9, koefisien untuk tingkat pengangguran adalah 0,010 dengan nilai probabilitas 0,3744>0,05. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap IKK. Dengan kata lain, peningkatan inflasi cenderung menurunkan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_2 tidak terdukung. Penelitian ini menemukan bahwa Tingkat Pengangguran (TKP) tidak memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan yang diprosksikan oleh Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan pendapatan diantara pekerja, walaupun sebagian besar orang bekerja, tetapi jika terdapat kesenjangan pendapatan yang tinggi di antara pekerja, masih mungkin ada kelompok orang yang hidup dalam kemiskinan. Beberapa orang mungkin mendapatkan gaji yang sangat tinggi, sementara yang lain tetap dalam kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu di beberapa daerah di Sumatera Utara masih terdapat beberapa pekerjaan yang tidak bermutu (*Low Quality Jobs*), dimana daerah dapat memiliki tingkat pengangguran rendah tetapi masih menghadapi masalah kemiskinan karena pekerjaan yang tersedia tidak berkualitas tinggi. Pekerjaan dengan upah rendah atau kondisi kerja yang buruk mungkin tidak mampu

memberikan pendapatan yang cukup untuk mengangkat orang dari kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 9, Pendapatan Perkapita (PPK) memiliki koefisien sebesar $-0,0359$ dengan nilai probabilitas $0,0158 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan pendapatan per kapita secara signifikan mengurangi keparahan kemiskinan, sesuai dengan ekspektasi bahwa pendapatan yang lebih tinggi cenderung mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H3 terdukung.

Pendapatan Perkapita (PPK) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dimana semakin tinggi PPK suatu daerah maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan daerah tersebut akan turun. Tingkat PPK yang tinggi cenderung berdampak positif terhadap tingkat penghasilan masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan upah, dan memperluas peluang ekonomi bagi individu. Hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena lebih banyak orang memiliki akses ke pekerjaan yang memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lebih lanjut, meskipun pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan, dampaknya tergantung pada bagaimana pendapatan dihasilkan dan didistribusikan di masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang adil, maka kemungkinan besar akan terjadi akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang sementara sebagian besar masyarakat tetap miskin.

Oleh karena itu, distribusi pendapatan yang tidak merata bisa memperburuk kemiskinan meskipun PPK meningkat. Terakhir, Tingkat PPK yang tinggi biasanya memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk layanan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau dapat membantu mengangkat individu dari kemiskinan dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan memperbaiki kualitas hidup mereka, dimana Kebijakan ekonomi dan sosial yang diimplementasikan oleh pemerintah dapat mempengaruhi hubungan antara PPK dan kemiskinan. Misalnya, program bantuan sosial, program pelatihan keterampilan, insentif investasi, atau kebijakan pajak yang progresif dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan meskipun PPK tidak tumbuh secara signifikan.

Berdasarkan Tabel 9, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan koefisien positif sebesar $0,0726$ dengan nilai probabilitas $0,0097 < 0,05$, yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM cenderung meningkatkan IKK, yang mungkin menunjukkan bahwa meskipun IPM meningkat, keparahan kemiskinan tetap ada atau bahkan meningkat di beberapa wilayah, yang bisa menjadi indikasi adanya ketidakmerataan dalam

distribusi pembangunan manusia. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H4 tidak terdukung.

Kenaikan IPM tinggi bukan berarti akan menurunkan tingkat kemiskinan, kemungkinan hal ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dimana IPM mungkin tinggi, tetapi jika terdapat kesenjangan pendapatan yang besar di antara berbagai kelompok masyarakat, sebagian dari mereka mungkin tetap hidup dalam kemiskinan. IPM mencakup berbagai dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, tetapi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil. Penyebab lainnya mungkin karena ketidaksetaraan ekonomi dimana di beberapa daerah mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi manfaatnya mungkin tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Jika hanya sebagian kecil dari populasi yang mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi, sementara sebagian besar penduduk daerah tertentu tetap miskin.

Berdasarkan Tabel 9, interaksi antara inflasi dan zakat (INFLASI_ZAKAT) menunjukkan koefisien sebesar $-0,000105$ dengan nilai probabilitas $0,0488 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang memperlemah hubungan negatif antara inflasi dan kemiskinan. Dengan kata lain, pada tingkat zakat yang lebih tinggi, dampak negatif inflasi terhadap kemiskinan menjadi lebih kuat. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H5 tidak terdukung.

Zakat dapat diarahkan untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi ini dapat mencakup sektor-sektor seperti pertanian, industri kecil, dan infrastruktur. Dengan membangun ekonomi lokal, zakat dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga memberikan kontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, Zakat juga dapat memberikan bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang terkena dampak inflasi. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan pangan, pakaian, atau kebutuhan dasar lainnya kepada mereka yang harga-harga barang dan jasa naik akibat inflasi. Zakat dapat dialokasikan untuk memberdayakan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti kelompok miskin dan pengangguran. Bantuan ini dapat digunakan untuk mendirikan usaha kecil, memberikan pelatihan keterampilan, atau memberikan modal usaha, sehingga meningkatkan daya beli kelompok tersebut dan mengurangi dampak inflasi pada tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu Zakat dapat memainkan peran krusial dalam memoderasi hubungan antara inflasi dan kemiskinan dengan meratakan distribusi kekayaan, memberdayakan ekonomi lokal, dan memberikan perlindungan finansial kepada kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.

Berdasarkan Tabel 9, interaksi antara tingkat pengangguran dan zakat (TKP_ZAKAT) tidak signifikan dengan koefisien $3.49E-05$ dan nilai

probabilitas $0,7502 > 0,05$, menunjukkan bahwa zakat tidak memiliki pengaruh moderasi yang signifikan pada hubungan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan. Variabel Moderasi Zakat tidak mampu memoderasi kuat lemahnya pengaruh variabel Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan yang diproksikan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H6 tidak terdukung.

Zakat tidak mampu memoderasi kuat atau lemahnya interaksi antara tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa zakat merupakan sumbangan setiap muslim untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang termasuk tujuh kelompok penerima manfaat zakat. Zakat tidak berperan mungkin karena tingkat penerimaan zakat yang rendah tidak sebanding dengan jumlah Penduduk di Sumatera Utara, dan penerimaan Zakat rendah karena banyak kabupaten/ kota di Sumatera Utara beragama non-Muslim.

Berdasarkan Tabel 9, interaksi antara pendapatan per kapita dan zakat (PPK_ZAKAT) juga signifikan dengan koefisien $0,000301$ dan nilai probabilitas $0,0427 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat memperkuat pengaruh negatif pendapatan per kapita terhadap kemiskinan, di mana peningkatan pendapatan per kapita bersama dengan zakat cenderung lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H7 terdukung.

Zakat secara langsung mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat dengan cara memaksa pemilik kekayaan yang lebih berlebihan untuk membagi sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, sehingga secara umum Zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda (Novitasari et al., 2023). Selanjutnya, Zakat juga dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang miskin melalui program-program seperti pelatihan keterampilan, pinjaman modal usaha kecil, atau proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Ini membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang miskin, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan. Terakhir, Zakat tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Dengan membayar zakat, orang-orang lebih menyadari dan peduli terhadap kondisi orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Hal ini dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi yang merupakan faktor kontributor penting terhadap kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 9, interaksi antara Indeks Pembangunan Manusia dan zakat (IPM_ZAKAT) juga tidak signifikan dengan koefisien $2.92E-06$ dan nilai probabilitas $0,7263 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa zakat tidak memoderasi hubungan antara IPM dan kemiskinan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H8 tidak terdukung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soleh dan Wahyuni (2021) yang menemukan bahwa zakat tidak mampu memoderasi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan. Hal ini disebabkan kontribusi Zakat yang perolehnya semakin menurun dan jumlahnya kecil, tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Selain itu tingkat partisipasi wajib zakat yang merupakan kewajiban umat muslim belum optimal serta banyak kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara yang non-muslim. Akibatnya, zakat tidak memiliki dampak signifikan dalam mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan zakat sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal penting. Pertama, inflasi dan pendapatan per kapita berdampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, mengindikasikan bahwa peningkatan inflasi dan pendapatan per kapita menurunkan keparahan kemiskinan. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa peningkatan IPM di beberapa daerah justru diikuti dengan peningkatan keparahan kemiskinan. Sebaliknya, tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian, peran zakat sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara faktor-faktor ekonomi dan tingkat kemiskinan menunjukkan hasil yang beragam. Zakat ternyata memainkan peran yang signifikan dalam memoderasi pengaruh inflasi dan pendapatan per kapita terhadap kemiskinan. Khususnya, zakat memperlemah pengaruh negatif inflasi terhadap kemiskinan, artinya pada tingkat zakat yang lebih tinggi, dampak inflasi dalam mengurangi kemiskinan menjadi lebih kuat. Selain itu, zakat juga memperkuat pengaruh negatif pendapatan per kapita terhadap kemiskinan, sehingga ketika pendapatan per kapita meningkat, efek penurunan kemiskinan menjadi lebih signifikan dengan adanya zakat. Namun, zakat tidak memiliki peran yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh tingkat pengangguran maupun IPM terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, dalam konteks penelitian ini, zakat tidak cukup kuat untuk memengaruhi bagaimana pengangguran dan IPM berhubungan dengan kemiskinan di wilayah yang diteliti.

Daftar Rujukan

- [1] Ada'uddin, A. Y., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh Gross Domestic Product (GDP) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dengan Zakat Distribution sebagai Variabel Moderasi pada Tahun 2011-2020. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1607-1614. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1032>.

- [2] Amalia, R., & Rachmawati, L. (2022). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Surabaya. *Independent: Journal of Economics*, 2(1), 175–186. DOI: <https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.46004> .
- [3] Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(2), 113–123. DOI: <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671> .
- [4] Deffrinica, D. (2019). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bengkayang. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(1), 37–47. DOI: <https://doi.org/10.31932/jpe.v2i1.462> .
- [5] Elvira, R. (2022). Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 129. DOI: <https://doi.org/10.29300/ba.v7i2.7942> .
- [6] Fadhilah, S. N., Indriyani, F., & Suharsono, S. (2022). Pengaruh Inflasi, Pertumbuh Ekonomi, Jumlah Penduduk terhadap Kesejahteraan dengan ZIS Sebagai Variabel Moderasi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 154. DOI: <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.4630> .
- [7] Hermawan, A. A., & Bahjatulloh, Q. M. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Zakat sebagai Variabel Moderasi di Indonesia Tahun 2016-2020. *El-Amwal*, 5(1), 1. DOI: <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i1.6183> .
- [8] Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh Pdrb, Pengangguran dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 1. DOI: <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252> .
- [9] Mardiatillah, R., Panorama, M., & Maftukhatusolikhah, M. (2021). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 365–370. DOI: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8825> .
- [10] Novitasari, H., Bahjatulloh, Q. M., & Wartoyo. (2023). How Zakat Moderating the Influence of Human Development Index , Labor , Gross Regional Domestic Product on Poverty in Central Java ? . *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'Ah*, 15(2), 204–219. DOI: <https://doi.org/10.24235/amwal.v15i2.10956> .
- [11] Prasetya, G. M., & Sumanto, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *Kinerja*, 19(2), 467–477. DOI: <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.10956> .
- [12] Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipdm), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217. DOI: <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663> .
- [13] Puente-López, J. L., Lis-Gutiérrez, J. P., & Pulido-Flórez, J. S. (2022). The Legatum Prosperity Index and Non-Cooperative Tax Jurisdictions (2021). *Procedia Computer Science*, 203, 514–519. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.07.072> .
- [14] Purboningtyas, I., Sari, I. R., Guretno, T., Dirgantara, A., Agustina, D., & Haris, A. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Saintika Unpam: Jurnal Sains Dan Matematika Unpam*, 3(1), 81. DOI: <https://doi.org/10.32493/jsmu.v3i1.5640> .
- [15] Sari, E. N. (2019). Analisis Faktor Inflasi Bulanan Provinsi Banten 2011-2017. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 31–41. DOI: <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1166> .
- [16] Sari, P. A., & Hidayat, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham Pada Perusahaan Otomotif dan Komponen. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 246–259. DOI: <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.246-259> .
- [17] Sarjan, M., Abubakar, A., & Basri, H. (2022). Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Al-Qur'an. *Pepatuzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasayarakatan*, 18(1), 25. DOI: <https://doi.org/10.35329/fkip.v18i1.2949> .
- [18] Susanti, S. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1. DOI: <https://doi.org/10.24198/jmi.v9.n1.9374.1-18> .
- [19] Thesia, D. Y., & Karmini, N. L. (2022). Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ukm dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(03), 271. DOI: <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i03.p03> .
- [20] Tri Septiani, W., Zamzami, Z., & Mustika, C. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(3), 135–148. DOI: <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i3.7351> .
- [21] Wang, Y., Huo, Z., Li, D., & Zhang, M. (2022). Evaluation of Common Prosperity Level and Regional Difference Analysis along the Yangtze River Economic Belt. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19). DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph191911851> .
- [22] Zuhdiyat, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31. DOI: <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42> .